

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI DI KABUPATEN BELITUNG

MARINE TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY AT BELITUNG MUNICIPALITY

Oscar Prima dan Baban Sobandi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN)
Jl. Cimandiri No. 34-38 Bandung 40115
Telp. (022) 4237375, Fax. (022) 4267683
Email: kangbaban2011@yahoo.com

Abstract

Tourism sector especially nautical tourism, is expected to be one of the mining sector as a substitute for seed sector and local revenue sources in District Belitung. Sementara the huge potential for marine tourism has not been managed optimally. On that basis, the study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats to marine tourism in Belitung province, as an input to formulate future development strategy. By using SWOT analysis, produced several strategies with the priorities of the strategy of diversification. In implementing this strategy, the Government of Belitung province must do several things including increasing cooperation between the regional organization (OPD) to build or improve facilities, equipment and infrastructure for marine tourism; develop the competence of tourism for people engaged in the tourism sector and tourism businesses; and to improve the management and development of tourist attraction.

Keywords: Tourism, marine tourism, SWOT

Abstrak

Sektor Pariwisata khususnya wisata bahari, diharapkan bisa menjadi salah satu pengganti Sektor Pertambangan sebagai sector unggulan dan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Belitung. Sementara itu, potensi wisata bahari yang besar belum dikelola secara optimal. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap wisata bahari di Kabupaten Belitung, sebagai bahan masukan untuk merumuskan strategi pengembangan ke depan. Dengan menggunakan analisis SWOT, dihasilkan beberapa strategi dengan prioritas strategi diversifikasi. Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung harus melakukan beberapa hal antara lain meningkatkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun atau meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bahari; mengembangkan kompetensi kepariwisataan bagi masyarakat yang bergerak dalam Sektor Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata; serta meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.

Kata Kunci: Pariwisata, Wisata Bahari, Strategi, SWOT

A. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, secara jelas mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri demi mendukung suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah mengharuskan kesiagaan suatu daerah untuk berusaha mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan. Hal ini mengandung implikasi penilaian terhadap kualitas dari daerah ditinjau dari segi financial, materiel dan riil.

Dalam menyelenggarakan dan membangun daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mencari sumber-sumber pendapatan asli daerahnya berdasarkan potensi-potensi ataupun kekayaan yang dimiliki oleh daerah dengan cara pemanfaatan dan pengelolaan secara baik dan optimal. Satu potensi pembangunan yang paling menunjang adalah potensi pariwisata yang masih belum didayagunakan secara maksimal. Potensi pariwisata dianggap cukup potensial sebagai satu diantara komoditi pengganti bahan-bahan tambang yang perlu untuk dikelola dan dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Belitung. Potensi Wisata di Kabupaten Belitung terdiri dari 3 (tiga) kategori daya tarik wisata, yaitu wisata alam yang berjumlah 41 lokasi, wisata buatan berjumlah 9 lokasi dan wisata budaya berjumlah 23 lokasi yang tersebar didalam 5 kecamatan. Wisata bahari di Kabupaten Belitung masuk didalam wisata alami dan berjumlah 33 lokasi.

Untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung, pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyusun

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Belitung Tahun 2009-2019. Terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 mendorong perlu dilakukan telaahan terhadap kesesuaian antara amanat dan arahan pembangunan pariwisata yang termuat dalam dua peraturan perundangan tersebut dengan muatan dalam RIPPDA Kabupaten Belitung sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung menyusun ulang RIPPDA Kabupaten Belitung menjadi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung (RIPPARKAB Belitung) Tahun 2015-2025.

Didalam pengembangan pariwisata, sarana dan prasarana merupakan satu faktor penting didalam keberhasilan pembangunan pariwisata. Di Kabupaten Belitung sarana dan prasarana dirasa sangat kurang memadai. Seperti prasarana jalan umum. Kabupaten Belitung memiliki jalan sepanjang 901,33 km. Dengan rincian jalan negara sepanjang 153,52 km, jalan provinsi sepanjang 132,43 km, dan sisanya merupakan jalan kabupaten sepanjang 615,38 km. Kondisi jalan yang rusak ringan dan berat banyak ditemukan pada jalan-jalan menuju daya tarik wisata, terutama di bagian selatan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik pada Belitung dalam angka tahun 2010-2014, Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Wisatawan Ke Kabupaten
Belitung

Tahun	Jumlah Wisatawan
2009	42.233
2010	50.501
2011	83.893
2012	111.613
2013	131.542

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2010-2014

Perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Belitung tidak diimbangi dengan perkembangan sistem transportasi yang ada. Wisatawan yang datang ke Kabupaten Belitung dihadapkan dengan sulitnya mengakses angkutan umum yang murah, cepat, dan nyaman. Angkutan umum yang ada selama ini masih sangat terbatas dengan trayek yang juga masih terbatas. Kondisi ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan kepariwisataan Kabupaten Belitung kedepan.

Untuk mengunjungi Kabupaten Belitung, Wisatawan dari luar Pulau Belitung dapat menggunakan alat transportasi laut dan transportasi udara. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Belitung sangat tergantung terhadap keberadaan pelabuhan untuk aktifitas pengiriman barang maupun Wisatawan menuju ke Kabupaten Belitung. Pelabuhan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung saat ini ada dua yaitu Pelabuhan Tanjungpandan dan Pelabuhan Tanjung Ru' yang aktif digunakan untuk transportasi wisatawan menuju Kabupaten Belitung. Sementara Pelabuhan Tanjung Batu masih belum beroperasi secara optimal. Kedepan peningkatan kapasitas pelabuhan mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya tarik kapal pesiar dan kapal layar untuk bersandar di Kabupaten Belitung.

Untuk transportasi udara, Kabupaten Belitung memiliki satu bandara, yaitu bandara H.A.S. Hanandjoedin yang terletak di Kecamatan Tanjungpandan. Hingga saat ini bandara H.A.S. Hanandjoedin mampu didarati oleh pesawat jenis kecil seperti Twin Otter hingga pesawat berbadan besar airbus 737-800. Namun demikian, jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat menjadikan bandara yang ada sekarang sudah sangat padat dan tidak representatif.

Satu kebutuhan dasar wisatawan ketika berkunjung ke suatu daya tarik wisata adalah kebutuhan akan fasilitas akomodasi yang representatif. Saat ini Kabupaten Belitung telah memiliki berbagai fasilitas akomodasi dengan berbagai kelas. Dari mulai kelas penginapan/ hotel nonbintang hingga hotel bintang dan homestay. Kelengkapan berbagai fasilitas akomodasi ini tentu saja menambah nilai daya saing Kabupaten Belitung sebagai satu destinasi pariwisata. Namun demikian jumlah akomodasi masih terpusat di Kecamatan Tanjungpandan. Selain itu, standar pelayanan akomodasi harus terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang datang.

Selain Hotel, Ketersediaan rumah makan dan restoran merupakan fasilitas yang menjadi kebutuhan wisatawan ketika mengunjungi destinasi pariwisata. Kabupaten Belitung selain memiliki keindahan alam juga memiliki beragam kuliner daerah yang dapat dinikmati wisatawan diberbagai restoran dan rumah makan yang tersedia. Ketersediaan rumah makan dan restoran di Kabupaten Belitung akan melengkapi kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan selama berkunjung di Kabupaten Belitung. Meski secara jumlah rumah makan dan restoran tersedia, namun sebarannya yang masih terpusat di sekitaran Kecamatan

Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk menyebabkan wisatawan tidak memiliki alternatif tempat makan dan minum yang representatif ketika mengunjungi Kecamatan lainnya.

Potensi wisata di Kabupaten Belitung sangat menjanjikan apabila dikelola dengan maksimal. Untuk menciptakan daya saing dengan daerah wisata lainnya, Kabupaten Belitung harus segera berbenah. Daya saing antar daerah wisata merupakan suatu faktor yang tidak bisa dihindari dalam dunia pariwisata. Karena daya saing itu sendiri akan mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung.

Berdasarkan letak, Kabupaten Belitung berjarak lebih dekat dari ibukota negara dan hanya memakan waktu tempuh ± 50 menit dengan pesawat terbang. Hal ini harus bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Belitung untuk dapat merebut pasar pariwisata.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan/kuliner dan lain-lain.

Oleh karena itulah diperlukan adanya kesiapan pemerintah daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan masing-masing daerah.

Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan lembaga dari segi organisasional atau institusional dalam bentuk dinas pariwisata, sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pariwisata serta efektifitas pengembangan untuk masa yang akan datang

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana strategi pengembangan Pariwisata Bahari dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Belitung?

C. TINJAUAN TEORI

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam penelitian, penulis akan mengedepankan beberapa teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan bagaimana strategi pengembangan pariwisata bahari sebagai penunjang PAD Kabupaten Belitung.

• Konsep Pengembangan Pariwisata Bahari

Menurut Sedarmayanti (2014:55) "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah". Dari sisi supply, pariwisata lebih banyak dilihat sebagai industri/bisnis. Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri/bisnis memfokuskan pada keterkaitan antara barang dan jasa untuk memfasilitasi perjalanan wisata. Seperti yang dikemukakan oleh Craig-Smith and French (1994: 2)

"...a series of interrelated goods and services which combined make up the travel experience".

Dimana Craig-Smith dan French beranggapan pariwisata dalam dimensi industri/bisnis adalah sebagai keterkaitan antara barang dan jasa yang dikombinasikan untuk menghasilkan pengalaman berwisata.

Menurut Pendit (1999:48) pariwisata bahari merupakan satu jenis wisata yang banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan didaerah-daerah atau negara-negara maritim, termasuk di Indonesia.

Pengembangan pariwisata menurut Pearce (1981:12) mempunyai arti sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas mengenai pengembangan pariwisata, dapat dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pembangunan dari yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada menjadi lebih baik dan berkualitas yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan dengan memerhatikan kode etik pariwisata global yang telah menjadi standard dalam pengembangan pariwisata. Menurut Sedarmayanti (2014:14) pengembangan pariwisata harus dilakukan berdasarkan kriteria :

1. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat seluruh stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat).
2. Memberi manfaat bagi rakyat, manfaat material, spiritual, kultural dan intelektual.
3. Berdasarkan prinsip lingkungan dan ekologi sehat, peka terhadap atau tidak bertentangan nilai

sosial, budaya dan tradisi keagamaan yang dianut penduduk setempat, serta tidak menempatkan penduduk setempat pada posisi yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia.

4. Hendaknya dikendalikan sehingga tidak melampaui ambang batas daya dukung lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas hubungan manusia yang sehat berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Dalam pengembangan pariwisata dikenal juga adanya pelaksanaan kebijakan Sapta Pesona. Sedarmayanti (2014 : 30) mengemukakan sapta pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung kesuatu daerah atau wilayah tertentu di Indonesia. Kita harus menciptakan suasana indah mempesona, khususnya di tempat - tempat yang banyak dikunjungi wisatawan agar mereka betah tinggal lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberi kenangan indah dalam hidupnya.

Adapun unsur sapta pesona terdiri dari aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Dalam pengembangan pariwisata, keberhasilan dapat dicapai dengan perencanaan yang sangat matang. Seperti yang diungkapkan oleh Dowling dan Fennel (2003:7) yaitu :

“tourism planning cannot be carried out in isolation but must be integrated into the total resource analysis and development of the area with possible land and water conflicts resolved at any early stage. Recently prepared tourism plans gave much emphasis to socio-economic and environmental factors and to concept of controlled development”.

Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa perencanaan pariwisata tidak dapat dilakukan dalam pemisahan tetapi harus diintegrasikan ke dalam analisis sumber daya total dan pembangunan daerah dengan penyelesaian atas kemungkinan konflik tanah dan air pada setiap tahap awal. Rencana pariwisata yang telah disiapkan memberikan banyak penekanan pada factor sosial-ekonomi dan lingkungan dan konsep pengendalian pembangunan.

Bambang (2013:132) mengemukakan tiga strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan, nyaitu :

1. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan pada pertumbuhan (growth oriented model)
2. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat (community based tourism development)
3. Strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keberlanjutan pembangunan kepariwisataan (sustainable tourism development).

Penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan disuatu destinasi termasuk di Indonesia, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari peran para pelaku usaha dan tanggung jawab para pemangku kepentingan yang terlibat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepariwisataan yang ada di wilayah destinasi itu sendiri. Berdasarkan pada UU No. 10 Tahun 2009, paling tidak terdapat 3 (Tiga) komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu pihak

Pemerintah, pihak Swasta dan pihak Masyarakat yang terkait. Untuk mewujudkannya pemerintah telah melaksanakan pembentukan organisasi pengelola destinasi yang biasanya dikenal sebagai Destination Management Organization (DMO). Menurut Bambang (2013:170), DMO pada dasarnya merupakan bentuk otoritas pengelolaan destinasi yang terkoordinasikan dalam satu otoritas manajemen yang mencakup keseluruhan fungsi pengelolaan terhadap elemen-elemen pembentuk suatu destinasi itu sendiri, utamanya pada aspek-aspek :

- a. Pengembangan Produk
- b. Pengembangan Pemasaran
- c. Pengembangan Lingkungan

Dalam Pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata yang menarik untuk di kunjungi oleh wisatawan, menurut Yoeti (1996:177) daerah tersebut harus mempunyai tiga syarat yaitu daerah itu harus mempunyai apa yang disebut *something to see*, *Something to do* dan *something to buy*.

Ketiga syarat itu merupakan suatu paduan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan daerah tujuan wisata pada suatu daerah.

• **Konsep Manajemen Strategis**

Hesterly dan Barney (2010:4) mengemukakan "strategy is defined as it's theory about how to gain competitive advantages. A good strategy is strategy that actually generates such advantages"(Strategi didefinisikan sebagai teori tentang bagaimana untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Sebuah strategi yang baik adalah strategi yang benar-benar menghasilkan keuntungan).

Menurut Bryson (2007:189), Strategi dapat dipandang sebagai pola

tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya, yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa strategi dapat diartikan sebagai cara organisasi dalam merespon lingkungannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. Perubahan-perubahan dan kompleksitas yang dihadapi organisasi perlu direspon dengan cara tertentu sebagai upaya organisasi dalam mencapai tujuannya serta sesuai dengan lingkungan organisasi.

Suatu strategi yang telah ditetapkan harus diyakini akan berhasil. Hatten dan Hatten (Salusu, 2015:72-73) memberi beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses yaitu:

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraikan beraikan satu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan titik-titik yang justru adalah kelemahannya.
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
6. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar.
7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan terutama dari para eksekutif, dari semua

pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Penyusunan strategi pada prinsipnya disesuaikan dengan kondisi, potensi serta kemampuan dan kebutuhan organisasi dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan, sasaran, serta kerjasama dengan semua pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Tangkilisan (2003:13) mengemukakan elemen-elemen yang terkandung dalam sebuah strategi, yaitu:

- a. Misi dan harapan organisasi,
- b. Tujuan dan sasaran,
- c. Memperkirakan situasi strategik,
- d. Strategi formulasi
- e. Strategi evaluasi dan pilihan-pilihan yang akan mengembangkan alternatif-alternatif strategi.
- f. Strategi implementasi dan perencanaan

Dalam perumusan strategi sebuah organisasi harus berorientasi pada misi sehingga tujuan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan, maka organisasi itu harus diteliti dan cermat dalam menganalisis faktor lingkungan, serta mampu memilih alternatif strategi yang tepat dan sesuai juga mempertimbangkan permasalahan yang paling urgen dan ketersediaan sumber daya manajemen (personil, peralatan, finansial, dll) yang dapat menunjang pelaksanaan strategi yang dipilih tersebut.

Jika konsep strategi dikaitkan dengan konsep manajemen, maka terlahir konsep manajemen strategik. Menurut David (2010:5), Manajemen strategis didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Fokus

manajemen strategis terletak pada memadukan manajemen pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi untuk mencapai keberhasilan strategi yang akan dikembangkan.

Menurut Dess dan Lumpkin (2006:9), "strategic management consist of the analysis, decisions, and action an organization undertakes in order to create and sustain competitive advantages." (Adapun manajemen strategis terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif).

Dari beberapa definisi manajemen strategis sebagaimana tersebut diatas, maka manajemen strategis adalah serangkaian kegiatan analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, serta serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam waktu jangka panjang, manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi dan evaluasi serta pengendalian.

Proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar (Hunger dan Wheelen, 2003 : 9) yaitu :

1. Pengamatan Lingkungan
2. Perumusan Strategi
3. Implementasi Strategi
4. Evaluasi dan Pengendalian

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai pariwisata dan manajemen strategis maka dapat kita simpulkan bahwa Manajemen Pariwisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata.

Menurut Bambang (2013:77-81) Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraannya yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat terkait

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dan berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

2. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan.

Para pelaku dan pemangku kepentingan harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan.

3. Kemitraan kepemilikan local.

Keterkaitan antara pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan local dari berbagai usaha serta peningkatan Sumber daya manusia dan kesempatan lapangan pekerjaan.

4. Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut.

Program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa SDA dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.

5. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan, agar tercipta kondisi yang harmonis antara wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat

6. Daya dukung lingkungan
Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas local dan daya dukung lingkungan yang ada

7. Monitor dan evaluasi program
Kegiatan ini mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

8. Akuntabilitas lingkungan
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan

9. Pelatihan pada masyarakat terkait
Untuk membekali masyarakat akan pengetahuan dan keterampilan dan meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan profesional

10. Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan.
Pembangunan kepariwisataan juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan

• Perumusan Strategis Dengan Analisis SWOT

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi dan misi dengan faktor-faktor strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

Rangkuti (2009:20) mengemukakan bahwa : "Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses)."

Wheelen dan hunger dalam solihin (2004 : 165) menggunakan tabel External Factor Analysis Summary (EFAS) dan tabel Internal Factor Analysis Summary (IFAS) untuk meringkaskan hasil pemindaian lingkungan agar dapat dilakukan analisis yang akan memberikan kesimpulan bagi para manajer, strategi apa yang harus dibuat oleh perusahaan setelah mengkaji hasil pemindaian lingkungan tersebut. Tabel EFAS dan IFAS berasal dari analisis SWOT yang telah dimodifikasi oleh Wheelen dan Hunger dengan memberikan bobot serta peringkat untuk masing-masing faktor yang mencerminkan tingkat kepentingan suatu faktor dibandingkan faktor lainnya.

Selanjutnya faktor -faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan Matriks SWOT untuk menentukan strategi mana yang paling tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, sehingga pengembangan pariwisata bahari berjalan maksimal dan dapat menunjang PAD. Strategi yang efektif akan membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang dengan meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman.

• Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah. Menurut Herlina (2005:38) PAD merupakan

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa PAD adalah hasil perolehan atau pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mempunyai 4 (empat) komponen yaitu:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil penerimaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah lainnya yang dipisahkan (Laba usaha daerah);
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:9) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Nazir (1999:64) metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar berkala”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara jelas dan teliti untuk memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam kondisi suatu objek.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Peneliti memilih Purposive sampling beranggapan bahwa orang tersebut dapat memberikan informasi yang diharapkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan kunci (key informan) yaitu orang-orang yang dianggap baik dalam pengetahuan maupun keterlibatan informan tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Wawancara (interview)

Peneliti akan menggunakan wawancara bebas terpimpin dalam pengumpulan data dan mempergunakan pedoman wawancara guna mengarahkan peneliti dalam mendapatkan informasi.

b. Observasi

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dan observasi terstruktur atau tersamar.

c. Study Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data

berdasarkan pada dokumentasi yang berasal dari lembaga/instansi/badan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

Untuk memperoleh data yang lebih kredibel, maka diperlukan adanya suatu pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut sah (valid) dan dapat diandalkan. Adapun cara yang digunakan dalam menguji kredibilitas data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi data. Sedangkan untuk menguji realibilitas data adalah dengan memeriksa transkrip untuk memastikan bahwa selama pembuatan transkrip tidak mengandung kesalahan fatal dan selanjutnya memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam mengartikan kode, pergeseran makna kode selama proses pengkodean.

Tahap pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, mengedit data, mengklasifikasikan dan memilah-milah berdasarkan satuan gejala yang diteliti. Setelah itu penulis akan menerapkan langkah-langkah metode analisis SWOT yang akan dilakukan untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT dalam penelitian ini didasarkan pada konsep manajemen strategis Wheelen dan Hunger (2003 : 9-20), yaitu:

1. Pengamatan lingkungan internal dan eksternal
2. Perumusan Strategi
3. Implementasi Strategi
4. Evaluasi dan Pengendalian

E. HASIL PENELITIAN

• Keadaan Geografis Kabupaten Belitung

Wilayah Kabupaten Belitung terletak di Pulau Belitung dengan luas lebih kurang 229.369 Ha atau 2.293,69 Km². Secara administratif wilayah

Kabupaten Belitung berbatasan langsung dengan daratan dan lautan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar

Dalam pelaksanaan pemerintahannya Kabupaten Belitung terdiri dari 5 Kecamatan, 7 kelurahan, dan 42 desa definitif, 125 dusun, 30 lingkungan, 314 RW dan 863 RT. Berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Belitung jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 167.604 jiwa dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung 73 orang per Km². Jumlah ini meningkat 2,18 persen jika dibandingkan tahun 2012.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Sekretariat KORPRI, Inspektorat Daerah, 14 Dinas, 5 Badan, 4 Kantor, 1 Rumah Sakit Umum Daerah dan 5 Kecamatan. Sementara itu potensi aparatur negara yang ada hingga tahun 2013 terdapat 3.664 Pegawai Negeri Sipil (PNS) non guru yang tersebar di berbagai satuan kerja di Kabupaten Belitung. Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh PNS di kabupaten Belitung tahun 2013 maka jumlah pegawai yang lulusan S1 menempati urutan pertama dengan persentase 39,1 %, disusul dengan lulusan SLTA 24,9 %, dan urutan yang ketiga adalah lulusan DIII 14,3 %.

Hal ini menunjukkan kualitas SDM yang digunakan semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan golongan dan kepankangan, jumlah PNS Non Guru seluruhnya yang duduk di golongan I sebanyak 21 orang, golongan II sebanyak 1.175, golongan III sebanyak 1.732 dan golongan IV sebanyak 736

Dilihat dari kelompok jabatan structural untuk PNS daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung adalah 23 orang eselon II, 123 orang eselon III, 422 orang eselon IV dan 20 orang eselon V.

Perkembangan Pulau Belitung sebagai daerah tujuan wisata nasional menjadikan Kabupaten Belitung, yang merupakan pintu gerbang menuju kawasan ini, dituntut untuk meningkatkan berbagai kualitas daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, prasarana umum, dan fasilitas umum. Dalam pengembangan pariwisata bahari, pemerintah daerah dituntut untuk kerja keras untuk menyajikan pariwisata bahari yang memiliki nilai jual dan menarik minat wisatawan.

Aksesibilitas menuju Kabupaten Belitung dapat dicapai menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Kabupaten Belitung merupakan pintu gerbang laut dan udara Pulau Belitung. Dua pintu masuk Pulau Belitung terdapat di Kabupaten Belitung, yaitu Pelabuhan Tanjungpandan dan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin.

Transportasi darat menuju Kabupaten Belitung menghubungkan Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur karena hanya dua kabupaten tersebut yang berada di Pulau Belitung. Aksesibilitas menuju Belitung dari Belitung Timur dilayani oleh jalan raya yang kondisinya baik sehingga perjalanan dari ibu kota Kabupaten Belitung Timur (Manggar) ke ibu kota Kabupaten Belitung (Tanjungpandan) dapat ditempuh paling lama dalam

waktu 2 (dua) jam perjalanan dengan kendaraan roda empat.

Kondisi jalan yang menghubungkan kota-kota kecamatan di Kabupaten Belitung dalam kondisi baik sehingga berkontribusi terhadap kemudahan aksesibilitas di Kabupaten Belitung, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi atau sewa.

Kabupaten Belitung memiliki jalan sepanjang 901,33 km. Dengan rincian jalan negara sepanjang 153,52 km, jalan provinsi sepanjang 132,43 km, dan sisanya merupakan jalan kabupaten sepanjang 615,38 km. Dari keseluruhan jalan yang ada tersebut 66,37% dalam kondisi baik, 25,22% dalam kondisi sedang, dan sisanya 11,01% dalam kondisi rusak.

Kendala terbesar dari aksesibilitas darat di Kabupaten Belitung adalah terbatasnya angkutan umum yang menghubungkan jalur-jalur di dalam kota dan antarkecamatan. Selain jumlahnya sangat sedikit, trayek dan jam operasionalnya pun yang tidak menentu. Hingga saat ini tercatat ada 20 (dua puluh) unit bus dan 1017 (seribu tujuh belas) unit mini bus yang beroperasi di Kabupaten Belitung (Ripparkab Belitung, 2015-2025). Saat ini, Kabupaten Belitung memiliki empat terminal yang terletak di Tanjungpandan, Badau, Sijuk, dan Membalong. Jalur trayek angkutan umum di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Rute Angkutan Umum Darat
di Kabupaten Belitung Tahun 2014

No	Jenis Angkutan	Trayek
1.	Antar Kota	a) Tanjungpandan – Manggar (PP)
		b) Tanjungpandan – Kelapa Kampit (PP)
		c) Tanjungpandan – Membalong (PP)
		d)
2.	Dalam Kota	Seputar Kota Tanjungpandan dengan 13 trayek
3.	Perdesaan	Seluruh Kecamatan dengan 11 trayek

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung 2011-2031

Jalur trayek yang ada di Kabupaten Belitung belum mampu menjangkau seluruh titik daya tarik wisata yang ada. Jalur trayek masih terfokus di titik suber aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Situasi ini harus segera di perbaiki untuk meningkatkan kemudahan wisatawan dalam menjangkau berbagai daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Belitung dengan angkutan umum.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Belitung sangat tergantung terhadap keberadaan pelabuhan untuk aktifitas pengiriman barang maupun Wisatawan menuju ke Kabupaten Belitung. Pelabuhan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Daftar Pelabuhan dan Pelayaran di
Kabupaten Belitung
Tahun 2014

NO	NAMA PELABUHAN	FREKU ENSI PELAYARAN (PERBU LAN)	RUTE PELAYARAN	OPERATOR PELAYARAN
1	Pelabuhan Tanjungpandan	26 kali	Tanjungpandan – Pangkal Pinang (PP)	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (Express Bahari)
2	Pelabuhan Tanjung Ru'	8 kali	Tanjungpandan – Sadai (PP)	PT. ASDP (KM Gorare)
		6-8 kali	Tanjungpandan – Jakarta	PT. Bukit Merapin (KM. Srikandi, KM.Silvia, KM.Star Belitung)
3	Tanjung Batu	4 kali	Tanjungpandan – Jakarta – Pontianak	PT. PELNI

Sumber: Rencana Induk pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung 2015-2025

Selain yang tertera pada tabel diatas, terdapat juga transportasi laut berupa kapal-kapal kecil pariwisata yang berfungsi untuk menghubungkan daratan Pulau Belitung dengan obyek wisata berupa pulau-pulau kecil di sekitar, seperti Pulau Lengkuas, Pulau Kepayang, Pulau Babi, dan Pulau

Burung, yang disesuaikan dengan permintaan dari wisatawan serta paket wisata yang diberikan oleh biro perjalanan wisata. Sedangkan Aksesibilitas menuju Kepulauan Selat Nasik dan Pulau Seliudilayani oleh perahu motor secara reguler setiap harinya.

Kabupaten Belitung memiliki satu bandara, yaitu bandara H.A.S. Hanandjoedin yang terletak di Kecamatan Tanjungpandan. Bandara H.A.S. Hanandjoedin melayani penerbangan dari dan ke berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini terdapat 7 (tujuh) penerbangan langsung domestik setiap harinya yang menuju Kabupaten Belitung, yang terbagi menjadi 6 (enam) jalur penerbangan Jakarta-Tanjungpandan dan 2 (dua) penerbangan Pangkal Pinang-Tanjungpandan. Ini terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Rute Penerbangan ke Kabupaten Belitung Tahun 2014

RUTE		NAMA MASKAPAI	FREKUENSI PENERBANGAN	
Asal	Tujuan		Per Min ggu	Per hari
Jakarta	Tanjungpandan	Garuda Indonesia	7	1
		Citilink	7	1
		Sriwijaya Air	28	4
Pangkalpinang	Tanjungpandan	Wings Air	7	1
		Sriwijaya Air	7	1

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung 2015-2025

Keterbatasan dalam landasan bandara menyebabkan kabupaten Belitung sampai sekarang belum memiliki jadwal penerbangan internasional. Penerbangan internasional sangat penting bagi pariwisata karena dengan adanya penerbangan internasional akses wisatawan asing untuk berkunjung menjadi mudah. Selain Aksesibilitas, ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata di suatu destinasi pariwisata merupakan keharusan dalam kerangka memberikan berbagai pelayanan dan kepuasan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Berbagai fasilitas pariwisata tersebut diantaranya adalah :

1) Akomodasi

Diantara kebutuhan dasar wisatawan ketika berkunjung ke suatu daya tarik wisata adalah kebutuhan akan fasilitas akomodasi yang representatif. Saat ini Kabupaten Belitung telah memiliki berbagai fasilitas akomodasi dengan berbagai kelas. Dari mulai kelas penginapan/ hotel nonbintang hingga hotel bintang. Kelengkapan berbagai fasilitas akomodasi ini tentu saja menambah nilai daya saing Kabupaten Belitung sebagai destinasi pariwisata.

Selain akomodasi yang berupa hotel dan penginapan, masyarakat Kabupaten Belitung juga mengembangkan homestay yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan rumah mereka masing-masing. Fasilitas akomodasi dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Fasilitas Akomodasi di Kabupaten
Belitung Tahun 2009 – 2014

TA HU N	HOTEL BINTANG		HOTEL NONBINTANG		HOMESTAY	
	JU ML AH UNI T	JU ML AH KA MA R	JU ML AH UNI T	JU ML AH KA MA R	JU ML AH UNI T	JU ML AH KA MA R
2009	5	152	11	176		
2010	6	193	12	194		
2011	8	341	17	276		
2012	8	341	20	332		
2013	8	341	21	354	48	66
2014*	9	586	29	484	72	**

Keterangan: * = data sampai Juli 2014 ** data jumlah kamar tahun 2014 tidak teridentifikasi

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, 2015.

2) Fasilitas Makan dan Minum

Fasilitas makan dan minum yang terdapat di Kabupaten Belitung adalah rumah makan dan restoran. Ketersediaan rumah makan dan restoran merupakan fasilitas yang menjadi kebutuhan wisatawan ketika mengunjungi destinasi pariwisata. Kabupaten Belitung selain memiliki keindahan alam juga memiliki beragam kuliner daerah yang dapat

dinikmati wisatawan diberbagai restoran dan rumah makan yang tersedia. Jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Belitung dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Fasilitas Makan dan Minum
di Kabupaten Belitung Tahun 2014

KECAMATAN	JUMLAH RESTORAN	JUMLAH RUMAH MAKAN
TANJUNGPANDAN	17	16
SIJUK	7	2
BADAU*	-	-
MEMBALONG*	-	-
SELAT NASIK*	-	-

Keterangan: data sampai Juli 2014; *data tidak teridentifikasi

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, 2015

Restoran dan rumah makan yang terdapat di Kabupaten Belitung sebagian besar menawarkan menu masakan Padang, makanan laut, dan makanan Cina (Chinese food). Hal ini terkait dengan sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung yang bersuku Melayu dan Tionghoa, serta mata pencaharian penduduk yang sebagian besar juga nelayan.

Meski secara jumlah dan ragam sajian masakan yang disajikan cukup beragam, namun sebarannya yang masih terpusat di sekitar Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk menyebabkan wisatawan tidak memiliki alternatif tempat makan dan minum yang representatif ketika mengunjungi Kecamatan Membalong, Kecamatan

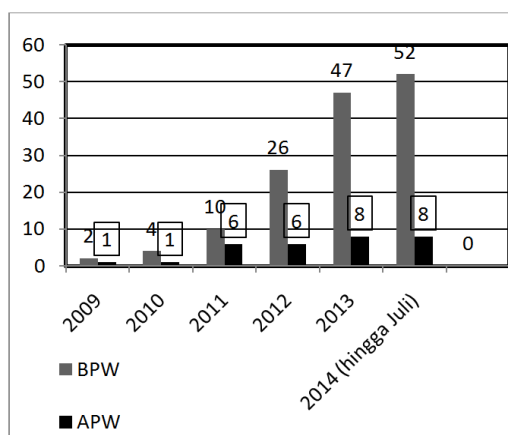
Selat Nasik, dan Kecamatan Badau, karena di daerah ini belum terdapat restoran atau rumah makan yang baik.

3) Fasilitas Perjalanan Wisata

Fasilitas perjalanan wisata yang terdapat di Kabupaten Belitung adalah Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW). BPW dan APW merupakan satu komponen keberhasilan suatu destinasi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Keberadaan BPW dan APW yang tidak cukup hanya dari sisi kuantitasnya, kualitas pelayanan kedua fasilitas perjalanan wisata ini juga turut menentukan kinerja pariwisata Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung telah banyak memiliki BPW dan APW yang mampu melayani wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Perkembangan jumlah BPW di Kabupaten Belitung dalam empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari data berikut:

Gambar 1
Perkembangan Jumlah BPW dan APW di Kabupaten Belitung Tahun 2009 – Juli 2014



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, 2015

4) Fasilitas Kesehatan

Penyediaan kebutuhan akan fasilitas kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pada tahun 2014, Kabupaten Belitung memiliki 9 (sembilan) Puskesmas, 31 Puskesmas Pembantu yang tersebar di lima kecamatan, 1 (satu) buah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Belitung, dan 2 (dua) buah rumah sakit swasta yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, Tanjungpandan.

Meski secara kuantitas keberadaan tiga rumah sakit sudah cukup memadai untuk Kabupaten Belitung, namun kualitas dan sebarannya masih sangat terbatas. Letak rumah sakit yang seluruhnya terdapat di Kecamatan Tanjungpandan menyebabkan akses masyarakat dan wisatawan yang berada dibagian selatan Kabupaten Belitung menjadi tidak mudah.

5) Fasilitas Keuangan

Perkembangan pariwisata Kabupaten Belitung yang semakin meningkat dari tahun ketahun membutuhkan dukungan berbagai fasilitas keuangan yang dapat memberikan pelayanan disetiap saat. Dukungan berbagai fasilitas keuangan diperlukan untuk mempermudah wisatawan yang jumlahnya terus meningkat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan selama berada di Kabupaten Belitung. Beberapa fasilitas keuangan tersebut adalah Bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan money changer.

Ketersediaan Bank dan ATM di Kabupaten Belitung sudah cukup memadai meski sebarannya masih terkonsentrasi di Kota Tanjung Pandan, sementara itu ketersediaan money changer belum terdata. Belum terdatanya keberadaan money changer karena wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Belitung masih sangat terbatas jumlahnya.

Namun demikian, upaya untuk menyediakan fasilitas money changer harus terus didorong untuk mengantisipasi perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, sebaran ATM juga perlu diperbanyak agar tidak hanya terkonsentrasi di Tanjungpandan sehingga dapat mempermudah wisatawan dalam melakukan transaksi keuangan di berbagai daerah di Kabupaten Belitung. Data ketersediaan Bank di Kabupaten Belitung selengkapnya terlihat di tabel berikut:

Tabel 7
Jumlah Bank yang Beroperasi di
Kabupaten Belitung
Tahun 2013

No	Jenis Bank	Jumlah Bank	
		2012	2013
1	Bank Pemerintah		
	a. Kantor Cabang	3	3
	b. Kantor Cabang Pembantu	8	5
	c. Kantor Kas	1	1
	d. Kas Mobil	1	-
	e. Loker Pelayanan	-	2
2	Bank Swasta		
	a. Kantor Cabang	1	1
	b. Kantor Cabang Pembantu	5	5
	c. Kantor Kas	-	2
3	Bank Perkreditan Rakyat		
	a. Kantor Cabang	2	2
Jumlah		21	21

Sumber: Belitung Dalam Angka, Tahun 2014

6) Fasilitas Peribadatan

Islam sebagai mayoritas agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Belitung, maka tempat peribadatan agama Islam pun memiliki jumlah paling banyak dibandingkan dengan jumlah tempat peribadatan agama lainnya.

Banyak dan tersebar nya tempat ibadah, terutama tempat ibadah bagi kaum muslim akan sangat memudahkan wisatawan untuk melaksanakan keyakinan agamanya ketika mengunjungi berbagai daya tarik wisata yang tersebar di Kabupaten Belitung. Jumlah tempat ibadah yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Jumlah Tempat Ibadah
di Kabupaten Belitung
Tahun 2011 - 2013

N O .	NAMA KECAMATAN	ISLAM			KRISTEN	HINDU	BUDHA
		MAJLID	LANGGAR	MUS HOL A	(GERAJA)	(PURUSA)	(Vihara)
1	Sijuk	24	-	5	-	-	-
2	Tanjungpandan	51	-	30	6	1	1
3	Selat Nasik	7	-	-	0	-	-
4	Membalong	38	-	5	1	-	-
5	Badau	20	-	6	0	-	-
Jumlah 2013		133	-	46	7	1	1
2012		133	55	58	13	4	8
2011		129	101	57	9	0	6

Sumber: Belitung dalam Angka, Tahun 2014

7) Prasarana Umum

a) Air bersih

Kebutuhan dasar hidup manusia adalah ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan

sehari-hari. Kabupaten Belitung memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dapat melayani penyediaan air bersih bagi masyarakat maupun wisatawan. Sumber air minum yang selama ini digunakan oleh PDAM berasal dari pengolahan air sungai, danau, sungai dalam dan mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Belitung. Setiap tahun pelanggan PDAM mengalami peningkatan meski pelayanan PDAM belum bisa menjangkau masyarakat Kabupaten Belitung secara keseluruhan. Keadaan ini tentu saja cukup menyulitkan bagi wisatawan yang membutuhkan akses air bersih ketika mengunjungi berbagai daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Belitung, meskipun ketersediaan air bersih di hotel dan penginapan tidak mengalami hambatan.

b) Telekomunikasi

Sarana komunikasi yang terdapat di Kabupaten Belitung di antaranya warung telepon, warung internet, kantor pos/pos pembantu, dan pos keliling. Semakin tingginya tuntutan wisatawan akan kemudahan untuk berkomunikasi, Kabupaten Belitung telah dilayani oleh operator telpon selular, yaitu Telkomsel, Excelcomindo, dan Indosat. Pada tahun 2014, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung mencatat ada 117 menara telekomunikasi yang berdiri diseluruh wilayah kabupaten yang berfungsi untuk memperluas jangkauan keseluruh wilayah kabupaten.

c) Listrik

Ketersediaan listrik untuk mendukung perkembangan kepariwisataan Kabupaten Belitung sangat penting. Berbagai fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sangat membutuhkan pasokan listrik untuk tetap beroperasi dan melayani wisatawan.

Produksi tenaga listrik di Kabupaten Belitung dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tetapi ketersediaannya belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Listrik masih terpusat di sekitar Ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, sementara di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan listrik masih belum tersedia. Tentu saja kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan jangkauan layanan listrik hingga ke pelosok demi menunjang perkembangan pariwisata karena beberapa daya tarik wisata terletak di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan listrik.

• **Kepariwisataan Dalam Kebijakan Dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Belitung**

Pengembangan pariwisata bahari merupakan suatu program yang melibatkan banyak pihak. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu arahan untuk menentukan hasil akhir yang diinginkan bersama. Untuk pengambilan suatu kebijakan mengenai pengembangan pariwisata diperlukan suatu gambaran lokasi beserta potensi yang ada.

Dalam pembangunan wilayah Kabupaten Belitung, arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung terdapat pada beberapa kebijakan berikut:

- a. Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2025;

RPJPD Kabupaten Belitung juga menetapkan pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah yang pengembangannya ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung diarahkan kepada dukungan dan

penciptaan sentra-sentra kegiatan perekonomian masyarakat, investasi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Pengelolaan kawasan pariwisata dalam jangka panjang diarahkan pada upaya pengembangan kawasan terpadu dengan mengandalkan daya tarik wisata alam, bahari, budaya dan sejarah.

Pariwisata sebagai sektor ekonomi berbasis potensi lokal juga mendapatkan prioritas dalam pengembangan investasi. RPJPD Kabupaten Belitung mendorong Pemerintah Kabupaten Belitung untuk berperan dalam penciptaan iklim berinvestasi yang kondusif, pemberian kemudahan pengurusan dan perizinan serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kerja yang memadai;

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Belitung dibagi menjadi empat tahap pembangunan jangka menengah, yaitu tahap pertama (tahun 2005-2009), tahap kedua (tahun 2010-2014), tahap ketiga (2015-2020), dan tahap keempat (2021-2025). Pembangunan kepariwisataan menjadi prioritas di setiap tahap pembangunan jangka menengah, tetapi dengan fokus pembangunan yang berbeda-beda setiap tahunnya. Fokus pembangunan kepariwisataan di setiap tahap pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Fokus Pembangunan Kepariwisata
setiap Tahap Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Belitung

TAHUN 2005-2009	TAHUN 2010-2014	TAHUN 2015-2020	TAHUN 2021-2025
Peningkatan kualitas promosi pariwisata	Pengembangan potensi pariwisata Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata	Pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi	Kontinuitas pengembangan potensi pariwisata, Pengembangan sumber daya manusia berbasis pariwisata

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung 2015-2025

- b. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2011-2031;

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung tahun 2011-2031 memang belum ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Belitung, walaupun demikian dokumen rancangannya dapat memberikan gambaran mengenai arahan pemanfaatan ruang pariwisata di Kabupaten Belitung. Pariwisata merupakan satu dari tiga sektor unggulan Kabupaten Belitung yang menjadi tujuan penataan ruang Kabupaten Belitung. Tujuan penataan ruang yang dirumuskan bagi Kabupaten Belitung untuk tahun 2011-2031 adalah "Terwujudnya ruang Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memerhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor perikanan, perhubungan, dan pariwisata".

Dalam rencana struktur ruang Kabupaten Belitung, Sijuk dan Badau ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang pengembangannya diarahkan juga bagi sektor pariwisata. Bahkan, Sijuk menjadi pusat pertumbuhan penting bagi kepariwisataan Kabupaten Belitung.

Rencana pola ruang Kabupaten Belitung mengatur pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata. Dalam RTRW disebutkan bahwa kawasan pariwisata ini diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan daya tarik wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi, dan kegiatan lain yang menunjang kepariwisataan.

Kabupaten Belitung akan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Sijuk dan Kawasan Pariwisata di Kecamatan Membalong. Lingkup wilayah dan luasan masing-masing kawasan peruntukan pariwisata dapat dilihat pada tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 10
Rencana Kawasan Peruntukan
Pariwisata Kabupaten Belitung

KAWA SAN	KECAMA TAN	DESA	LUAS (Ha)	%
KEK Wisata Sijuk	Kec. Sijuk	- Ds. Sijuk - Ds. Tanjung Binga - Ds. Keciput	3.908,523	76,943
Kawasan Wisata	Kec. Memba long	Ds. Padang Kandis	1.171,246	23,057
		TOTAL	5.079,769	100,000

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung 2011-2031

Selain sebagai KEK Pariwisata Sijuk, Kawasan Pariwisata Sijuk juga menjadi Kawasan Strategis Kabupaten

dengan fungsi pariwisata. KSK Sijuk dengan fungsi pariwisata ini berpusat di Tanjung Kelayang.

RTRW Kabupaten Belitung membagi wilayah pengembangan pariwisata menjadi tiga, yaitu Wilayah Pengembangan A, B, dan C. Wilayah A merupakan kawasan dengan pengembangan prioritas utama, wilayah B merupakan kawasan dengan prioritas kedua, sementara wilayah C merupakan kawasan dengan prioritas pengembangan terakhir.

1) Wilayah Pengembangan Pariwisata A

Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) A merupakan wilayah pengembangan prioritas pertama. Daya tarik wisata yang termasuk dalam kategori ini adalah daya tarik wisata prioritas tinggi dan sudah dikenal dunia, berupa peninggalan-peninggalan sejarah pendiri Kabupaten Belitung dan masa kolonial yang dikombinasikan dengan kekayaan alam hutan, pantai/laut, dan pulau-pulau kecil. WPP A menjadi prioritas pertama dengan pertimbangan bahwa pengembangannya akan lebih mudah dilakukan karena promosi dan studi mengenai daya tarik yang ada sudah banyak tersedia. WPP A mencakup koridor Tanjung Pandan-Sijuk dengan daya tarik wisata sebagai berikut:

- a) Daya tarik wisata utama di Tanjung Pandan dan sekitarnya, yaitu Pantai Tanjung Pandam dan gedung-gedung kuno peninggalan Belanda;
- b) Daya tarik wisata utama di Sijuk dan sekitarnya, yaitu:
 - ✓ Wisata pantai (Pantai Senilai, Bukit Berahu, Pantai dan Permukiman Nelayan Tanjung Binga, Pantai Marina, Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Mabai, Tanjung Tinggi, dan lain-lain);

- ✓ Wisata pulau (Pulau Kera, Pulau Lengkuas, P. Burung, dan lain-lain);
- ✓ Wisata budaya (situs-situs budaya);
- ✓ Wisata hutan (hutan Konservasi).

2) Wilayah Pengembangan Pariwisata B

WPP B memiliki daya tarik wisata yang lebih beragam, yaitu pantai dan sungai, bahari dan pulau-pulau kecil, budaya, hutan, pegunungan, dan air terjun. Lingkup wilayah ini meliputi koridor TanjungPandan–Badau dengan daya tarik wisata berikut ini:

- a) Wisata pantai dan sungai (Pantai Pengantungan, Pulau Bayan dan Sungai Securuk),
- b) Wisata pulau (Pulau Rengit),
- c) Wisatabudaya (situs-situs budaya dan permukiman Bali),
- d) Wisata hutan (hutan lindung),
- e) Wisata pegunungan (kawasan Gunung Tajam, Laki dan Bini),
- f) Wisata air terjun (Air Terjun Gurok dan Beraye).

3) Wilayah Pengembangan Pariwisata C

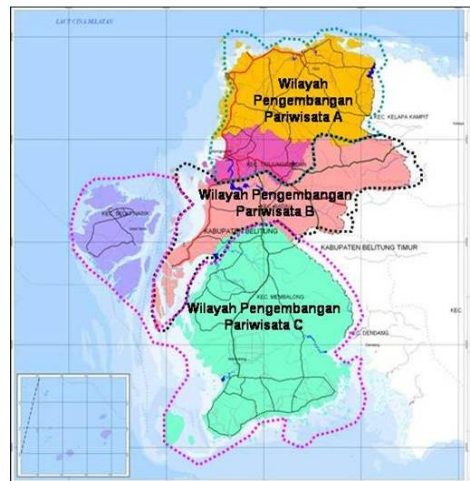
Daya tarik wisata yang khas untuk WPP C adalah potensi wisata agrowisata dan minawisata. Wilayah ini meliputi koridor Tanjungpandan–Badau–Membalong–Selat Nasik dengan daya tarik wisata utamanya adalah:

- a. Wisata pantai (Pantai Gembira, Panyabong, Batu Kura, dan lain-lain)
- b. Wisata pulau (Pulau Seliu)
- c. Wisata budaya (situs-situs budaya)
- d. Wisata hutan (hutan lindung)
- e. Wisata pegunungan (kawasan bukit baginda)
- f. Wisata agro-mina (kawasan agropolitan dan minapolitan).

Rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung juga akan didukung dengan penyelenggaraan transportasi wisata. RTRW Kabupaten Belitung menjelaskan bahwaterdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan transportasi wisata, yaitu ketersediaan kapasitas jalur yang memadai, jaminan keamanan (safety), ketepatan waktu, kenyamanan perjalanan, dan keamanan (security). RTRW juga mendorong pembangunan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Belitung (Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif) dan swasta, terutama dengan para pelaku wisata.

Gambar 2

Wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung



Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2011-2031

c. Rencana Aksi Pariwisata Kawasan Sijuk.

Dalam rangka mewujudkan RPJPD Kabupaten Belitung dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten Belitung serta berdasarkan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyusun Rencana Aksi Pariwisata Kawasan Sijuk yang merupakan lokasi prioritas dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung. Pengembangan Kawasan Sijuk sebagai kawasan pariwisata unggulan Kabupaten Belitung juga akan mendukung pengembangan destinasi unggulan provinsi Kawasan Pulau Belitung dan sekitarnya, serta mendorong fungsi Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Rencana Aksi Pariwisata Kawasan Sijuk disusun untuk tahun perencanaan 2010-2015.

Berdasarkan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung dan Rencana Aksi Pariwisata Kawasan Sijuk, kepariwisataan memiliki posisi yang penting dalam peta pembangunan wilayah Kabupaten Belitung, yaitu sebagai satu sektor unggulan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Belitung telah pula berkomitmen untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Sijuk sebagai destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Belitung.

- Pengaruh Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Satu tujuan dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung yaitu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik Kabupaten Belitung. Secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan peluang tenaga kerja, merangsang pertumbuhan usaha pariwisata, yang keseluruhannya berarti dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Pendapatan sektor pariwisata yang semakin meningkat merupakan suatu faktor yang ikut meningkatkan PAD Kabupaten Belitung. Perkembangan pendapatan daerah dari

sektor pariwisata dapat terungkap melalui data sebagai berikut :

Tabel 11
Penerimaan PAD dari sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung Tahun 2013-2014

No	PAD Sektor Pariwisata	2013	2014
1	Pajak Hotel	1.509.774.624	2.293.448.590
2	Pajak Restoran	2.003.382.401	2.851.781.779
3	Pajak Hiburan	251.838.600	366.977.331
4	Pajak Parkir	34.251.500	40.680.775
5	Pajak Air Bawah Tanah	81.556.872	81.934.176
6.	Ret. Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	87.970.300	95.230.700
7.	Ret. Tempat Khusus Parkir	46.614.000	31.927.000
8.	Retribusi Tempat Penginapan/Pe sanggahan Villa	105.000	-
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	1.650.337.165	1.711.307.380
10.	Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	65.000.000	10.000.000
Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata		5.730.830.462	7.483.287.731
Jumlah PAD		93.226.723.913	72.424.526.883

No	PAD Sektor Pariwisata	2013	2014
Persentase Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah PAD		6,15%	10,33%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Belitung, 2015

Potensi pariwisata sebenarnya bukan hanya meningkatkan PAD saja tetapi juga ikut meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu selain pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dan pihak swasta harus menyadari betapa pentingnya pengembangan pariwisata dan ikut serta bersinergi dengan pemerintah dalam membangun pariwisata daerah.

Menilai Lingkungan Internal (S-W) dan Lingkungan Eksternal (O-T) serta merumuskan strategi Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Belitung Pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung harus berdasarkan dengan kebijakan yang mengikat dimana kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait. Peneliti harus mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk menentukan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung.

Penetapan dan Perhitungan skor faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Kesimpulan Analisis Faktor Internal
(KAFI) Pengembangan Pariwisata
Bahari Di Kabupaten Belitung

NO	FAKTOR INTERNAL STRATEGIK	BOBOT	RA TING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6
Kekuatan (Strength)					
1	Komitmen untuk bekerja secara maksimal	12	4	48	
2	Koordinasi yang baik antar internal pegawai	8	4	32	
3	RIPPARKAB Belitung telah disusun sebagai dasar pengembangan pariwisata	4	2	8	
4	Pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata telah sesuai rencana dan anggaran	4	2	8	
5	Lokasi pelaksanaan promosi wisata telah diseleksi sebelum dilaksanakan	8	4	32	
6	Pelaksanaan kerja telah sesuai dengan tupoksi masing-masing.	4	2	8	
Total Kekuatan		40		136	
Kelemahan (Weaknesses)					
1	Kuantitas dan kualitas SDA belum maksimal	16	2	32	
2	Struktur organisasi belum mempunyai seksi urusan kelembagaan dan kemasyarakatan pariwisata	4	2	8	
3	Peraturan daerah khusus pariwisata (RIPPADA) belum	12	2	24	

NO	FAKTOR INTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
	ada				
4	Fasilitas Kerja belum memadai	4	1	4	
5	Promosi yang dilakukan masih dirasa kurang maksimal	16	3	48	
6	Anggaran terbatas untuk urusan pilhan	8	2	16	
	Total Kelemahan	60		132	
	TOTAL	100			

Sumber : Hasil wawancara dari informan dan observasi, 2015 (data diolah)

Selanjutnya penetapan dan pemberian skor faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) Pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAPE) Pengembangan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Belitung

NO	FAKTOR EKSTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
1	2	3	4	5	6
	Peluang				
1	Potensi wisata bahari yang baik dengan bentang pantai yang luas dan alam yang mempunyai ciri khas tersendiri	15	4	60	
2	Komitmen, kerjasama dan koordinasi yang	11	3	33	

NO	FAKTOR EKSTERNAL STRATEJIK	BOBOT	RATING	SKOR	KESIMPULAN PRIORITAS
	baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah daerah				
3	Kerjasama dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam pembangunan pariwisata	7	4	28	
4	Pemda mendukung dan membantu investasi pariwisata	4	3	12	
5	Letak geografis yang dekat dengan ibukota negara	4	3	12	
6	Kabupaten Belitung terpilih sebagai DMO	4	3	12	
	Total Peluang	45		157	
	Ancaman				
1	Kualitas SDM belum memadai	11	3	33	
2	Peraturan zona lokasi dari pemerintah pusat	4	2	8	
3	Obyek wisata yang masih sedikit serta belum dikelola dan ditata secara maksimal	15	4	60	
4	Masih kurangnya tingkat sadar wisata masyarakat	7	2	14	
5	Potensi Kerusakan alam dan pengaruh budaya asing sangat tinggi	7	2	14	
6	Beberapa fasilitas, sarana dan prasarana wisata yang kurang memadai	11	3	33	
	Total Ancaman	55		162	
	TOTAL	100			

Sumber : Hasil wawancara dari informan dan observasi, 2015 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan bobot faktor-faktor internal dan eksternal didapatkan skor pembobotan sebagai berikut: faktor kekuatan = 136; faktor kelemahan = 132; faktor peluang = 157; faktor ancaman = 162. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan titik koordinat sebagai berikut:

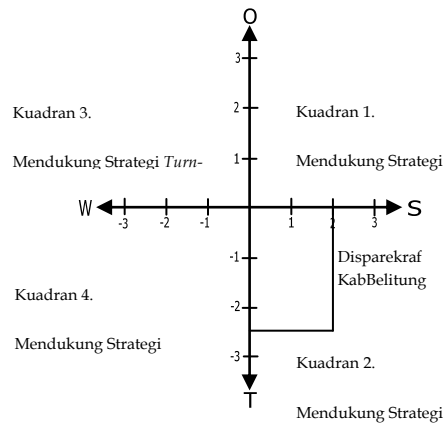
$$= \frac{\text{Skor (S)} - \text{skor (W)}}{2}, \frac{\text{skor (O)} - \text{skor (T)}}{2}$$

$$= \frac{136 - 132}{2}, \frac{157 - 162}{2}$$

$$= (2, -2,5)$$

Dengan demikian, peta SWOT pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung dapat dipetakan sebagaimana gambar berikut

Gambar 3
Posisi Disparekraf Pada Berbagai Kondisi
Dilihat Dari Faktor-Faktor S,W,O, Dan T



Sumber: Hasil Analisis Kafi Dan KafePengembangan Pariwisata Bahari Kabupaten Belitung (Diolah)

Dari peta SWOT tersebut di atas dapat dilihat bahwa posisi SWOT Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung berada pada kuadran II. Sehubungan dengan kuadran SWOT, menurut strategi yang harus dilakukan organisasi pada kuadran II adalah mendukung strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi merupakan suatu proses untuk menambah satu atau lebih bisnis baru ke dalam portofolio usaha perusahaan yang berbeda dengan bidang usaha perusahaan saat ini (Solihin, 2012:191).

Setelah pemetaan pada kuadran SWOT, selanjutnya dilakukan formulasi arah strategi dengan menggunakan matrik SWOT yang dikembangkan oleh Wheelen dan Hunger. Matriks SWOT yang akan menghasilkan beberapa pilihan strategi, matriks disajikan dibawah ini:

TABEL 14
MATRIKS SWOT KAFI-KAFE
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI KABUPATEN BELITUNG

Kesimpulan Analisis Faktor	Ranking Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Ranking Kelemahan(<i>Weaknesses</i>)
	1. Komitmen untuk bekerja secara maksimal 2. Koordinasi yang baik antar internal pegawai 3. RIPPARKAB Belitung telah disusun sebagai dasar pengembangan pariwisata 4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata bahari telah sesuai rencana dan anggaran 5. Lokasi pelaksanaan promosi wisata telah diseleksi sebelum dilaksanakan 6. Pelaksanaan kerja telah sesuai dengan tupoksi masing-masing.	1. Kuantitas dan kualitas SDA belum maksimal 2. Struktur organisasi belum mempunyai seksi urusan kelembagaan dan kemasyarakatan pariwisata 3. Peraturan daerah khusus pariwisata (RIPPARDA) belum ada 4. Fasilitas Kerja belum memadai 5. Promosi yang dilakukan masih dirasa kurang maksimal 6. Anggaran terbatas untuk urusan pilhan
Kesimpulan Analisis Faktor	Asumsi Strategi S-O	Asumsi Strategi W-O
Ranking Peluang(<i>Opportunities</i>) 1. Potensi wisata bahari yang baik dengan bentang pantai yang luas dan alam yang mempunyai ciri khas tersendiri 2. Komitmen, kerjasama dan koordinasi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah daerah 3. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam pembangunan pariwisata 4. Pemda mendukung dan membantu investasi pariwisata 5. Letak geografis yang dekat dengan ibukota Negara 6. Kabupaten Belitung terpilih sebagai DMO	1. Menjalin kerjasamadan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan investor untukmensukseskan progam Destination Management Organization (DMO). 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah event pariwisata bahari agar lebih memasarkan pariwisata. 3. Memetakan lokasi pengembangan pariwisata untuk kepastian potensi dan kemudahan berinvestasi.	1. Mempercepat proses pembuatan peraturan daerah tentang kepariwisataan 2. Membentuk suatu bidang dalam Disparekraf yang khusus mengurus kelembagaan pariwisata dan masyarakat. 3. Memaksimalkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kegiatan promosi
	Asumsi Strategi S-T	Asumsi Strategi W-T
Ranking Ancaman (<i>Threats</i>) 1. Kualitas SDM belum memadai 2. Peraturan zona lokasi dari pemerintah pusat 3. Obyek wisata yang masih sedikit serta belum dikelola dan ditata secara maksimal 4. Masih kurangnya tingkat sadar wisata masyarakat 5. Potensi Kerusakan alam dan pengaruh budaya asing sangat tinggi 6. Beberapa fasilitas, sarana dan prasarana wisata yang kurang memadai	1. Melakukan kerjasama antarSKPD untuk melengkapi serta membangun fasilitas, sarana, dan prasarana pariwisata bahari. 2. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang kepariwisataan bahari yang baik. 3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata	1. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia. 2. Memaksimalkan peraturan umum tentang rencana pembangunan seperti RPJP, RPJMD dan RTRW. 3. Memaksimalkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaannya.

Sumber: Hasil wawancara dengan informan penelitian (diolah)

Selanjutnya dari strategi tersebut diatas ditentukan urutan asumsi dan pilihan strategi untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) guna menentukan prioritas strategi yang harus dilaksanakan guna efektifitas pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung.

Untuk menentukan urutan asumsi dan pilihan strategi, maka diperlukan juga menetapkan nilai untuk pertimbangan penilaian. Dengan memerhatikan program kegiatan pemerintah maka, nilai yang peneliti anggap terkandung dalam pengembangan pariwisata bahari adalah rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Penentuan bobot terdiri dari angka 1 (tidak terkait), 2 (kurang terkait), 3 (terkait), dan 4 (paling terkait).

Tabel 15
MATRIKS PENETAPAN URUTAN ASUMSI DAN PILIHAN STRATEGI

ASUMSI STRATEJIK		KETERKAITAN DENGAN:							URUTAN PILIHAN STRATEGI
	VISI		MISI		NILAI				
	mewujudkan kabupaten belitung sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan berbasis pada potensi wisata alam dan kearifan lokal	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung percepatan laju pembangunan daerah;	Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal dan optimalisasi peranan usaha mikro kecil dan menengah	Reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Rasio nal	Transpara n	Parti sifapt if	Berta nggu ng Jawa b	
S-O:									
1. Menjalin kerjasama koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan investor untukmensukseskan progam Destination Management Organization (DMO)	4	1	2	3	3	3	3	3	22
2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas jumlah event pariwisata bahari agar lebih memasarkan pariwisata	4	1	1	2	3	3	2	3	19
3. Memetakan lokasi pengembangan pariwisata untuk kepastian potensi dan kemudahan berinvestasi.	3	1	3	3	3	3	2	3	21
									62
S-T:									
1. Melakukan kerjasama antar SKPD untuk melengkapi serta membangun fasilitas, sarana, dan prasarana pariwisata bahari.	4	1	1	4	3	3	4	3	23

2. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang kepariwisataan bahari yang baik.	2	4	2	1	3	3	4	3	22
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata	4	1	2	3	3	2	4	3	22
									67*
W-O:									
1. Mempercepat proses pembuatan peraturan daerah tentang kepariwisataan	4	1	2	3	3	3	2	3	21
2. Membentuk suatu seksi dalam Disparekraf yang khusus mengurus kelembagaan pariwisata dan masyarakat.	2	3	3	4	3	2	2	3	22
3. Memaksimalkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kegiatan promosi	4	1	2	3	4	3	3	3	23
									66
W-T:									
1. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia	2	1	1	4	3	2	3	3	19
2. Memaksimalkan peraturan umum tentang rencana pembangunan seperti RPJP, RPJMD dan RTRW	3	1	1	3	3	2	2	3	18
3. Memaksimalkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaannya.	3	1	1	4	3	3	1	3	19
									56

Selanjutnya menentukan Faktor Kunci Keberhasilan, menurut Suhendra (2014:50), FKK dapat terdiri atas 4 strategi dan maksimal 7 yang diambil dari asumsi strategik. Faktor Kunci Keberhasilan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung berdasarkan asumsi strategik yang telah di susun adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama antar SKPD untuk melengkapi serta membangun fasilitas, sarana, dan prasarana pariwisata bahari. Kerjasama antar SKPD merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama dalam berbagi kegiatan pembangunan dalam bentuk fisik maupun kegiatan lainnya dan juga saling menutupi kekurangan anggaran tiap SKPD.

2. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang kepariwisataan bahari yang baik.

Pelaksanaan pelatihan dan seminar ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Kegiatan ini harus bisa dilaksanakan setiap tahunnya serta harus efektif dan efisien. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga harus bisa bekerjasama dengan SKPD lainnya untuk pengadaan pelatihan dan seminar ini.

3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata. Dalam pelaksanaan strategi ini juga, Disparekraf harus bisa bekerja sama dengan SKPD lainnya agar lebih maksimal. Dalam strategi ini, Disparekraf harus bisa memaksimalkan dalam hal pengelolaan obyek wisata yang ada seperti menyediakan fasilitas kebersihan, meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan, menyediakan fasilitas kamar mandi dan WC, menyediakan tempat ibadah, menyediakan peralatan menyelam dan sebagainya.

4. Memaksimalkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kegiatan promosi. Disparekraf harus bisa menyeleksi setiap kegiatan promosi yang dilakukan sehingga tepat sasaran, efektif serta efisien dan harus bisa menambah anggaran untuk kegiatan promosi tersebut setiap tahunnya.

5. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan investor untuk mensukseskan program Destination Management Organization (DMO).

Program DMO ini harus bisa dimaksimalkan pelaksanaannya. Karena pada program ini masyarakat dan pihak swasta bisa berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan pariwisata serta bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata.

6. Membentuk suatu seksidalam Disparekraf yang khusus mengurus kelembagaan pariwisata dan masyarakat.

Disparekraf harus bisa menyakinkan pihak terkait seperti Bidang Organisasi dan Bidang Hukum Sekretariat Daerah serta pihak-pihak terkait lainnya akan pentingnya penambahan suatu seksi yang mengurus kelembagaan pariwisata dan masyarakat pariwisata dalam struktur organisasi Disparekraf. Dimana seksi ini bisa menjadi tempat koordinasi dan informasi bagi lembaga-lembaga usaha yang bergerak dibidang pariwisata.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan, bahwa pariwisata mempunyai kontribusi terhadap PAD Kabupaten Belitung. Hal ini dapat terlihat pada jumlah PAD dari sektor pariwisata selama dua tahun terakhir, yaitu 6,15% (tahun 2013), dan

10,33% (tahun 2014). Berdasarkan analisis, pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung harus bersifat diversifikasi. Dimana strategi untuk pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung, berdasarkan prioritas sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK), adalah :

1. Melakukan kerjasama antar SKPD untuk melengkapi serta membangun fasilitas, sarana, dan prasarana pariwisata bahari.
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang kepariwisataan bahari yang baik.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata.
4. Memaksimalkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kegiatan promosi.
5. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan investor untuk mensukseskan program Destination Management Organization (DMO).
6. Membentuk suatu bidang dalam Disparekraf yang khusus mengurus kelembagaan pariwisata dan masyarakat.

Dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Agar proses pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Belitung tidak terhambat, Pemerintah daerah Kabupaten Belitung harus bisa memerhatikan dan mempelajari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengembangan pariwisata,

khususnya pariwisata bahari. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Belitung bisa memaksimalkan setiap faktor-faktor pendukung sehingga bisa mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor penghambat serta dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata.

2. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata bahari perlu mengadakan suatu kajian ataupun perbandingan dengan daerah lainnya yang telah berkembang pariwisata baharinya. Sehingga pariwisata bahari Kabupaten Belitung memiliki daya saing dalam pemasaran. Seperti perbandingan dengan Pulau Lombok. Karena Pulau Lombok telah memaksimalkan potensi obyek wisata dalam hal jumlah obyek wisata, kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta fasilitasnya.
3. Pemerintah Kabupaten Belitung hendaknya melaksanakan strategi-strategi dan perencanaan pelaksanaan strategi rencana aksi yang peneliti rumuskan sesuai dengan tingkat prioritas berdasarkan Faktor Kunci keberhasilan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan Disparekraf Kabupaten Belitung, baik dari aspek internal maupun dari aspek eksternal Disparekraf Kabupaten Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Julianto. 2003. *Manajemen Strategis, Edisi kedua*. (Terjemahan dari Strategic Management 5th Edition by J. David Hunger & Thomas L. Wheelen). Yogyakarta : ANDI.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung. 2014. *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2015-2025*. Tanjungpandan
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Belitung. 2013. *Kabupaten Belitung Dalam Angka Tahun 2012*. Tanjungpandan
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Belitung. 2014. *Kabupaten Belitung Dalam Angka Tahun 2013*. Tanjungpandan
- Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kabupaten Belitung. 2015. *Kabupaten Belitung Dalam Angka Tahun 2014*. Tanjungpandan
- Barney, Jay. B & William S. Hesterly. 2010. *Strategic Management and Competitive Advantage, Third Edition*. New jersey : Prentice Hall.
- Bryson, M John. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Craig-Smith, Stephen dan French, Christine. 1994. *Learning to Live with Tourism*. Melbourne : Longman.
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung. 2010. *Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014*. Tanjungpandan
- Dess, G.G, Lumpkin, G.T. 2006. *Strategic Management : Texts and cases*. New York : McGraw Hill.
- Dowling, R.K. dan Fennel, D.A. 2003. *The Context of Ecotourism Policy and Planning*. Ontario : CAB International.
- Fred, R. David. 2010. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen. 2004. *Strategic Management And Business Policy*. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pearce, D. G. 1981. *Tourist Development*. Harlow. Longman Group Limited.
- Pendit, S Nyoman. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita
- Rangkuti, F. 2009. *Analiss SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk organisasi publik dan organisasi non profit cetakan ke 10*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti. 2014. *Membangun dan mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung : Pt. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung : Alfabeta.
- Suhendra. 2014. *Kajian Manajemen Stratejik Sektor Publik, Materi Kuliah Program Pasca Sarjana STIA LAN*. Bandung.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata
Nasional Tahun 2010-2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9
Tahun 1969 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengembangan Kepariwisata
Nasional

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun
1969 Tentang Pengembangan
Kepariwisata Nasional

